

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) / Staatblad Nomor 23 Tahun 1847;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Pelabuhan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor HK 003/1/11 Phb 2011 perihal pelaksanaan ketentuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero);
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara 12/KPPU-I/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 916 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Data	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13

1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	13
-----	-------------------------------------	----

BAB II KARAKTERISTIK *TYING AGREEMENT* ATAS PENGGUNAAN GLC YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA PT. PELINDO II & PT. MTI

2.1	Konsep <i>Tying Agreement</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha	15
2.2	Konsep <i>Tying Agreement</i> dilakukan Oleh PT. Pelindo II dan PT. MTI.....	22
2.2.1	PT. Pelindo II Sebagai BUMN Amanah Pasal 33 UUD 1945	22
2.2.2	PT. Pelindo II dan PT. MTI Dalam Pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	34
2.2.3	PT. MTI dalam Pengecualian Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.....	55
2.2.4	Kasus Pelanggaran <i>Tying Agreement</i>	59
2.3	Klasifikasi Karakteristik Tindakan <i>Tying Agreement</i> Oleh Pelaku Usaha PT. Pelindo II dan PT. MTI.....	70

BAB III *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA PELANGGARAN PENGGUNAAN *GANTRY LUFFING CRANE* (GLC)

3.1	Upaya Hukum KPPU Dalam Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 terkait dengan Pelanggaran <i>Tying Agreement</i>	79
-----	---	----

3.1.1 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule Of Reason</i>	79
3.1.2 Pendekatan Ekonomi Pelanggaran <i>Tying Agreement</i>	89
3.1.3 Sanksi	105
3.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pdt.Sus-KPUU/2016 terkait dengan Pelanggaran <i>Tying Agreement</i>	107
3.3 Analisis <i>Tying Agreement</i> dalam Putusan KPPU dan Putusan MA	114

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	118
4.2 Saran.....	119

DAFTAR BACAAN